

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis temuan BPK terkait penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dapat disimpulkan bahwa:

1. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yang terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan maksimal sehingga banyak temuan-temuan dari BPK. Faktor penyebab penatausahaan aset tetap menjadi temuan BPK adalah Kurangnya kerja sama antar pegawai, Hukum yang kurang dipatuhi oleh pengurus barang, Teknologi penunjang proses penatausahaan kurang memadai, Tidak adanya biaya untuk melakukan proses inventarisasi dan pengamanan terhadap aset tetap (tanah), dan Sumber daya manusia yang kurang kompeten. Secara umum faktor-faktor itulah yang menyebabkan penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menjadi temuan BPK.
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende adalah dalam menindaklanjuti temuan-temuan dari BPK dengan mengajukan tambahan biaya untuk melakukan inventarisasi, melakukan pelatihan kepada para pegawai penatausahaan aset daerah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya penatausahaan aset tetap, melakukan pendampingan berupa rekonsiliasi dan memperbaiki sistem administrasi, serta berusaha untuk saling

bekerja sama dan melakukan semua pekerjaan secara baik meskipun keahlian yang dimiliki oleh para staf tidak sesuai bidang yang ditekuni.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Ende, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende adalah:

1. Melakukan Penatausahaan aset tetap dengan baik dan benar dengan cara mengadakan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan teknis bagi kepala OPD untuk meningkatkan kompetensi, komitmen, dan pemahaman mereka dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah.
2. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah, serta menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan memahami manajemen aset dengan baik dan benar.
3. Mengkaji setiap rencana kebutuhan dan pemeliharaan aset yang dilaksanakan serta melakukan koordinasi yang baik antar SKPD dalam penatausahaan aset.
4. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan aset daerah serta melakukan evaluasi rutin terhadap pengguna aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirans, Ikbar. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 Kabupaten Jenoponto*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Erizul dan Febri Yuliana (2014) *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang*
- Febrianti, Sukma. *Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya*. *Jurnal Ekonomi Manajemen*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi, Muhammad. 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Harliman. 1998. *Optimalisasi dan Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Melalui Swastanisasi*. Skripsi. Jakarta. Fakultas Fisip, Universitas Indonesia.
- Kurnianto, Okta. 2017. *Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang*. Skripsi. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Piri, Triski. 2016. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Sulawesi Utara*. Skripsi. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- Sahlan, Muhammad. 2015. *Analisis Permasalahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Suradi, 2009. *Akuntansi Pengantar 1; Edisi Pertama*. Gava Media. Yogyakarta.
- Saputra, Ardi Rahmawan. 2012. *Kajian Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*.
- Sutri Kilonung, Monika, Ilat, Ventje, dan Pinatik Sherly. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tomohon*. *Jurnal EMBA*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No, 01 Tahun 2017 tentang *Standar Pemeriksa Keuangan Negara*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 tentang *Akuntansi Aset Tetap*.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 6 *Tentang Barang Milik Negara/Daerah Meliputi Barang yang di beli atau diperoleh atas APBN/APBD*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 *Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 *Tentang Barang Milik Daerah*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaan Negara*

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*